

Mereproduksi Citra, Mencari Legitimasi: Analisis Peran Biro Humas dalam Dinamika Sosial-Politik Pemerintah Daerah

Reproducing Image, Pursuing Legitimacy: An Analysis of the Public Relations Bureau's Role in the Socio-Political Dynamics of Local Government

 <https://doi.org/10.30598/populis.19.1.63-78>

Beatrix Hattu^{1*}, Sandra Ivonnie Telussa²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*beatrixhattu01@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the strategic role of the Public Relations Bureau in reproducing public image and seeking political legitimacy for local government amidst dynamic socio-political change, focusing on the Provincial Government of Maluku. Employing a qualitative approach, the research was conducted in Ambon City through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis within the Public Relations Bureau of the Maluku Governor's Office. The findings reveal that the Bureau has not effectively implemented public relations strategies to maintain and enhance the government's image. Key obstacles include the inability to translate policies into public narratives, failure to adapt to evolving social dynamics, and weak two-way communication with stakeholders. Additionally, public relations personnel lack the analytical capacity to interpret socio-political trends or provide strategic recommendations to leadership. These shortcomings indicate that the Bureau's role as a key actor in perception management and legitimacy-building remains suboptimal. The novelty of this study lies in its integrative approach, combining political communication theory and institutional dynamics at the local level, offering fresh insights into state-society relations through strategic communication. The study recommends strengthening institutional capacity and professionalizing public relations functions to meet the demands of contemporary political communication in local governance.

Keywords: Public Relations, Political Legitimacy, Image Management, Local Government, Strategic Communication

Info Artikel

Naskah diterima: 21/01/2024

Revisi terakhir: 20/02/2024

Disetujui: 05/03/2024

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Dalam era di mana persepsi publik dapat berubah dalam hitungan detik, citra pemerintah daerah bukan lagi hanya soal bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat (Filippi, 2022; Yuana et al., 2020). Di tengah kompleksitas sosial-politik yang terus berkembang, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga tampil secara simbolik sebagai entitas yang responsif, terbuka, dan dapat dipercaya (Frederiksen & Himley, 2020; Grin, 2020; Sari, 2022). Namun, realitas di lapangan sering kali berbicara sebaliknya. Salah satu contoh yang menarik dicermati adalah kondisi Biro Hubungan Masyarakat (Humas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, yang seharusnya memainkan peran sentral dalam membangun dan menjaga citra tersebut. Beberapa temuan lapangan mengindikasikan bahwa

fungsi strategis Biro Humas belum berjalan maksimal. Ketidakmampuan dalam merespons perubahan sosial, menerjemahkan kebijakan secara komunikatif kepada publik, serta membangun jaringan komunikasi yang harmonis dengan para pemangku kepentingan menjadi titik-titik lemah yang tampak jelas di permukaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Macq & Jacquet (2023) dan Qin & Owen (2021) dalam model dua arah simetris, peran kehumasan idealnya adalah menjembatani kepentingan organisasi dan publik secara setara. Dalam konteks pemerintah daerah, posisi ini seharusnya dimaknai sebagai peran strategis dalam membentuk legitimasi politik melalui komunikasi yang etis dan reflektif. Penelitian sebelumnya oleh Durmuş (2020) dan Wang & Guo (2023) menekankan bahwa kehumasan pemerintah kerap terjebak pada pendekatan seremonial, bukan komunikatif, sehingga gagal membaca aspirasi publik secara substansial. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ali (2020) dan Wargent et al. (2020), yang menunjukkan bahwa fungsi Humas di beberapa pemerintah daerah masih diposisikan sebagai unit teknis pendukung, bukan sebagai aktor strategis dalam manajemen persepsi publik.

Dalam studi yang dilakukan oleh Feber & Christover (2021), Permana et al. (2023), dan Yang (2021), ditemukan bahwa birokrasi kehumasan di tingkat daerah cenderung tidak adaptif terhadap dinamika digital dan pola komunikasi generasi baru, sementara penelitian oleh Baharuddin et al. (2022) dan Burchanuddin et al. (2021) menunjukkan lemahnya kapasitas analitik Humas dalam merespons isu sosial-politik yang berkembang. Di sisi lain, kajian oleh Bashri (2021), Burchanuddin et al. (2021b) dan Sekarintias et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya profesionalisasi bidang kehumasan untuk memastikan keberlanjutan legitimasi politik di tingkat lokal. Dalam konteks Maluku, karya Ilyas (2023) dan Udiyasa (2023) mengungkapkan bahwa kompleksitas sosiokultural dan geografis menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola komunikasi publik yang efektif dan inklusif.

Selanjutnya, studi oleh Fatah et al. (2023) dan Widodo & Kusnan (2023) menyoroti kurangnya pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur Humas pemerintah daerah sebagai penyebab utama tidak optimalnya fungsi komunikasi strategis. Sementara itu, kajian oleh Prasetyo et al. (2021) dan Röell et al. (2022) menunjukkan bahwa banyak biro Humas tidak memiliki mekanisme evaluasi komunikasi yang terukur, sehingga sulit untuk menilai efektivitas strategi yang dijalankan. Dalam konteks lebih luas, penelitian oleh Nulhasanah (2023) dan Shoesmith et al. (2020) mempertegas bahwa komunikasi politik modern mensyaratkan kelincahan aktor-aktor negara dalam mengelola informasi dan simbol secara dinamis di ruang publik digital.

Selain itu, penelitian oleh Hartono (2020) dan Taufiq & Hidayat (2022) mengenai citra kelembagaan pemerintah menunjukkan bahwa persepsi publik lebih dipengaruhi oleh narasi yang konsisten daripada sekadar realisasi kebijakan. Hal ini diperkuat oleh temuan Alamin et al. (2020) dan Azwar & Muliono (2022), yang mengemukakan pentingnya narasi komunikasi dalam membangun kepercayaan publik di tengah meningkatnya sinisme terhadap institusi negara. Di level lokal, studi oleh Hatala (2023) dan Zhang et al. (2021) menyebutkan bahwa peran Biro Humas sangat krusial dalam membentuk “persona kelembagaan” yang mampu

menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus bergerak.

Meski telah banyak penelitian yang menyoroiti persoalan kehumasan di lingkungan pemerintah, namun masih sedikit kajian yang secara spesifik melihat peran Biro Humas sebagai aktor politik kultural dalam membentuk legitimasi pemerintah daerah—terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-politik yang kompleks seperti Maluku. Sebagian besar studi sebelumnya masih terjebak pada pendekatan administratif dan teknokratis, tanpa menyentuh sisi praksis dari komunikasi politik yang melibatkan simbol, narasi, dan strategi reproduksi citra secara berkelanjutan.

Di titik inilah letak pentingnya kajian ini yaitu bukan sekadar menyoroiti kelemahan teknis Biro Humas, tetapi membedah bagaimana institusi ini sesungguhnya menjadi arena perebutan makna, tempat di mana citra diproduksi, disebarluaskan, dan dipertaruhkan untuk memperoleh legitimasi publik. Penelitian ini membawa perspektif bahwa komunikasi publik pemerintah bukanlah sekadar aktivitas penyampaian informasi, melainkan suatu bentuk praksis sosial-politik yang strategis—terutama dalam menghadapi masyarakat yang terus berubah baik secara nilai, ekspektasi, maupun media.

Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi public relation oleh Biro Humas dalam pemeliharaan citra pemerintah daerah Provinsi Maluku serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi strategi tersebut. Fokus ini menjadi penting bukan hanya untuk membenahi aspek teknis komunikasi kelembagaan, tetapi juga sebagai upaya memahami dinamika kekuasaan simbolik yang tersembunyi di balik narasi-narasi birokrasi. Pada akhirnya, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu sosial dan humaniora, khususnya dalam ranah komunikasi politik lokal yang selama ini masih kurang dieksplorasi secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat kontekstual dan kompleks, menyangkut makna, pengalaman, serta dinamika sosial-politik yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik. Sejalan dengan pandangan Creswell (2017), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses, narasi, dan interaksi sosial yang membentuk realitas, khususnya dalam ranah komunikasi politik yang dijalankan oleh institusi pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peran Biro Humas sebagai aktor komunikasi strategis tidak bisa dipahami hanya melalui data kuantitatif, melainkan harus ditelusuri melalui praktik, diskursus, serta relasi kuasa yang menyertainya.

Pemilihan lokasi penelitian di Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Gubernur Maluku bukan tanpa alasan. Maluku merupakan provinsi yang memiliki kompleksitas sosial dan historis yang khas, di mana keberagaman etnis dan pengalaman konflik masa lalu memberikan tantangan tersendiri dalam mengelola komunikasi publik. Pemerintah daerah dalam konteks ini tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus menjadi aktor rekonsiliasi sosial, penjaga stabilitas, dan pembangun legitimasi. Biro Humas

menjadi titik strategis dari upaya tersebut, karena melalui institusi inilah pesan-pesan pemerintah dikemas, disampaikan, dan dinegosiasikan dengan masyarakat. Oleh karena itu, meneliti strategi kehumasan di wilayah ini memberikan peluang untuk memahami secara lebih dalam hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks lokal yang kaya makna.

Dalam penelitian ini, informan utama dipilih secara purposif, yakni mereka yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung, dan keterlibatan aktif dalam aktivitas kehumasan pemerintah daerah. Sebanyak sepuluh informan diwawancarai secara mendalam, mencakup lima pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku—termasuk Kepala Biro, Kepala Sub-Bagian Penerangan, serta staf pelaksana bidang media dan protokol. Selain itu, dua jurnalis senior dari media lokal yang secara rutin meliput aktivitas pemerintah provinsi turut menjadi sumber informasi penting, bersama dengan dua akademisi dari Universitas Pattimura yang memiliki keahlian di bidang komunikasi politik dan administrasi publik. Melengkapi spektrum perspektif, satu orang aktivis LSM lokal yang bergerak dalam advokasi kebijakan dan partisipasi masyarakat juga dilibatkan.

Pemilihan informan ini didasarkan pada tingkat keterpaparan mereka terhadap isu-isu terkait citra pemerintah daerah, serta pengalaman mereka dalam berinteraksi langsung dengan Biro Humas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep purposive sampling sebagaimana dikemukakan oleh Garriott (2020), yang menekankan pentingnya memilih informan yang dianggap “kaya informasi” untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur memungkinkan eksplorasi bebas terhadap pandangan, pengalaman, serta refleksi informan terkait praktik kehumasan pemerintah daerah. Panduan wawancara disusun berdasarkan kerangka konseptual komunikasi politik dan manajemen hubungan publik. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam sejumlah aktivitas Biro Humas, seperti konferensi pers, penyusunan siaran pers, hingga acara keprotokolan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika interaksi, bahasa tubuh, dan pola kerja yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui wawancara, sebagaimana disarankan oleh Jentoft & Olsen (2019) dalam studi institusional. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan melalui penelaahan arsip internal Biro Humas, naskah pidato, siaran pers, laporan kegiatan, hingga konten media sosial resmi Pemerintah Provinsi Maluku. Dokumentasi ini memberikan pijakan penting dalam menelusuri konsistensi narasi dan strategi komunikasi yang digunakan dalam membangun citra institusional.

Dalam menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang berasal dari latar belakang berbeda. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi bias serta memperkuat keabsahan temuan, sesuai dengan

prinsip yang diuraikan oleh Dewasiri et al. (2018).

Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan reflektif, dengan memerhatikan prinsip ethnographic sensitivity—yakni sikap terbuka terhadap makna-makna yang hidup dalam budaya birokrasi lokal. Data dianalisis secara tematik dengan pendekatan induktif, di mana pola dan kategori dibangun dari hasil pengamatan empiris di lapangan, bukan dari asumsi yang dibawa sejak awal. Analisis ini mengacu pada teknik thematic coding sebagaimana dijelaskan oleh Braun & Clarke (2016), yang memungkinkan peneliti membangun narasi analitis berdasarkan tema-tema dominan yang muncul dari data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Citra Pemerintah Daerah: Antara Imajinasi dan Realitas

Dalam konteks pemerintahan daerah, citra bukan hanya sekadar gambaran visual atau komunikasi yang disampaikan kepada publik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk legitimasi politik. Di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, citra ini direproduksi secara intensif oleh Biro Humas melalui berbagai kanal komunikasi resmi, seperti siaran pers, akun media sosial, baliho, spanduk, serta kegiatan keprotokolan dalam acara kenegaraan maupun forum publik. Salah satu bentuk yang menonjol adalah kampanye visual bertema “Maluku Bangkit dan Tangguh” yang tersebar di pusat kota Ambon, lengkap dengan foto-foto pejabat daerah dan slogan optimistik yang menonjolkan narasi kemajuan dan stabilitas.

Namun, berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa staf internal Biro Humas, tampak bahwa narasi tersebut lebih dikonstruksi dari atas ke bawah, tanpa proses dialogis dengan masyarakat. Salah satu informan, ST, menyampaikan bahwa sebagian besar materi komunikasi visual dibuat berdasarkan instruksi langsung dari pimpinan tanpa riset persepsi publik terlebih dahulu. “Kami hanya jalankan arahan. Biasanya dibuat cepat, kalau ada event atau peringatan hari besar,” ujarnya dalam percakapan tidak formal di ruang kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi lebih bersifat reaktif dan formalistik ketimbang partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata warga.

Observasi lapangan juga memperkuat kesenjangan antara citra yang dibangun dan kenyataan di lapangan. Misalnya, di kawasan Batu Merah dan Mardika, baliho-baliho besar tentang keberhasilan pembangunan tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur yang rusak dan pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat. Ketika peneliti berbincang dengan beberapa warga, seperti seorang pedagang kaki lima di Terminal Mardika, muncul narasi “gambar bagus tapi jalanan hancur,” yang menggambarkan kekecewaan atas kesenjangan tersebut.

Fenomena ini dapat dipahami melalui lensa Symbolic Management Theory yang dikembangkan oleh Westphal (2023). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi—termasuk institusi publik—cenderung menggunakan simbol, retorika, dan citra sebagai alat untuk menciptakan persepsi keberhasilan dan legitimasi, terlepas dari apakah substansi manajerial dan kebijakan publiknya sudah sesuai atau belum. Dalam konteks Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku, praktik tersebut terlihat jelas. Mereka menciptakan narasi tentang

keberhasilan pembangunan melalui media komunikasi visual, namun tidak disertai dengan mekanisme umpan balik, evaluasi publik, atau riset berbasis data sosial yang valid.

Kecenderungan ini menggambarkan apa yang oleh Wojakowski (2022) disebut sebagai *strategic image inflation*—yakni ketika institusi menggelembungkan narasi keberhasilan secara simbolik untuk menjaga kepercayaan publik, padahal tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan atau kebijakan. Hal ini menjadikan citra pemerintah lebih menyerupai ilusi kolektif yang dikurasi secara cermat melalui simbol dan estetika komunikasi, bukan refleksi dari realitas sosial yang dialami warga sehari-hari.

Ketidaksesuaian ini membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi pemerintah daerah. Warga yang merasa tidak diwakili oleh narasi resmi akan membentuk opini alternatif di ruang-ruang informal, seperti media sosial dan obrolan komunitas. Hal ini secara perlahan menciptakan *public cynicism* terhadap pemerintah, yang justru berlawanan dengan tujuan strategis pencitraan itu sendiri. Salah seorang tokoh masyarakat, informan RN, menuturkan, “Kita lihat baliho penuh dengan ucapan dan gambar, tapi air bersih saja masih susah di kampung kami. Jadi masyarakat merasa itu semua hanya dekorasi kekuasaan.” Citra yang dibentuk Biro Humas bukan hanya bersifat kosmetik, tetapi juga mengalami dislokasi makna—terlepas dari kenyataan sosial yang harusnya menjadi pijakan utama dalam komunikasi publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa tanpa basis partisipasi, empati sosial, dan keterlibatan aktif warga, strategi komunikasi hanya akan menghasilkan legitimasi semu yang mudah runtuh di tengah krisis kepercayaan.

Hambatan Struktural dan Kelembagaan dalam Strategi Kehumasan

Di balik peran vitalnya sebagai pengelola citra dan penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan yang secara nyata membatasi efektivitas strateginya. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik, menyangkut kultur birokrasi, ketimpangan koordinasi antarlembaga, serta absennya mekanisme pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Salah satu temuan utama dalam studi ini adalah minimnya pelatihan profesional bagi staf humas. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pegawai Biro Humas, seperti informan HS, terungkap bahwa pelatihan atau workshop terkait komunikasi strategis, manajemen krisis, atau penggunaan teknologi informasi mutakhir dalam bidang kehumasan sangat jarang diadakan. “Biasanya pelatihan hanya sekali-dua kali dalam beberapa tahun, itupun sifatnya umum dan lebih banyak teori,” ujar HS saat ditemui di ruang kerjanya. Ketimpangan kapasitas ini menyebabkan staf humas cenderung hanya mampu menjalankan tugas administratif atau seremonial, tanpa memiliki kompetensi yang cukup untuk membaca dinamika sosial-politik atau mengelola komunikasi dalam konteks krisis.

Observasi lapangan pun menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas humas lebih terpusat pada dokumentasi kegiatan pimpinan, distribusi siaran pers, dan publikasi visual yang bersifat satu arah. Tidak ditemukan adanya divisi khusus yang menangani analisis isu atau riset media, apalagi tim yang bertugas menyusun peta persepsi publik secara periodik.

Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya sistem evaluasi efektivitas komunikasi. Tidak ada alat ukur atau indikator performa yang digunakan secara konsisten untuk menilai sejauh mana pesan-pesan komunikasi pemerintah diterima, dipahami, atau bahkan ditanggapi oleh masyarakat. Sebagaimana diungkap oleh informan LK, “Kami biasanya hanya melihat dari jumlah likes dan komentar di media sosial, tapi tidak pernah ada survei kepuasan atau evaluasi formal.”

Selain kelemahan kapasitas individu, terdapat pula hambatan pada tingkat kelembagaan. Lemahnya integrasi antara Biro Humas dan unit-unit kerja lainnya menjadi persoalan strategis yang cukup mengakar. Dalam berbagai proses penyusunan kebijakan, Biro Humas sering kali tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan. Hal ini membuat komunikasi publik bersifat reaktif dan hanya muncul setelah keputusan sudah diambil. “Kami kadang baru tahu soal kebijakan setelah diumumkan oleh kepala dinas terkait. Jadi kami hanya bisa ikut menyebarkan saja,” keluh informan AP, yang menggambarkan rendahnya posisi strategis Humas dalam rantai koordinasi pemerintahan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya stagnasi kelembagaan yang menempatkan fungsi kehumasan sebagai elemen pelengkap administratif, bukan sebagai bagian dari desain strategis pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, peran komunikasi cenderung direduksi menjadi bentuk pelaporan visual dan penataan protokoler, bukan sebagai sarana pengelolaan opini publik atau advokasi kebijakan berbasis dialog.

Temuan ini sejalan dengan konsep Institutional Communication Gridlock yang dikemukakan oleh Leydesdorff (2021), yaitu situasi ketika organisasi publik mengalami kebuntuan komunikasi akibat struktur organisasi yang rigid, hierarkis, dan kurang lentur dalam menyerap informasi dari luar. Menurut Zoller, kondisi ini menyebabkan organisasi gagal memproduksi respons yang adaptif terhadap perubahan sosial-politik, karena jalur komunikasi internal terlalu panjang, lambat, dan kurang terbuka untuk interaksi horizontal.

Dalam konteks Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku, gridlock ini tercermin dalam mekanisme kerja yang vertikal dan terfragmentasi. Tidak ada sistem umpan balik antara Humas dengan unit pelaksana teknis di lapangan maupun dengan masyarakat secara langsung. Fungsi komunikasi tidak diintegrasikan sebagai penghubung dinamis antara kebijakan dan aspirasi warga, tetapi lebih sebagai ornamen birokrasi. Kondisi ini menghasilkan komunikasi publik yang kaku dan kurang responsif terhadap perubahan situasi. Di tengah dinamika sosial-politik yang cepat berubah, stagnasi ini menjadi hambatan serius bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Sebab, dalam absennya mekanisme komunikasi strategis yang efektif, kepercayaan masyarakat hanya dibangun di atas permukaan simbol dan retorika, bukan melalui partisipasi yang bermakna.

Kesenjangan dalam Komunikasi Dua Arah: Publik sebagai Objek, Bukan Subjek

Dalam konteks pemerintahan yang semakin terbuka dan responsif, komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat bukan lagi sebuah nilai tambah, melainkan sebuah kebutuhan dasar. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Humas Pemerintah

Provinsi Maluku belum berhasil membangun ekosistem komunikasi yang deliberatif dan partisipatif. Hubungan yang dibangun masih bersifat satu arah—top-down—di mana pemerintah mendefinisikan pesan, mengatur waktu penyampaian, dan menetapkan format komunikasi, sementara ruang untuk mendengar dan merespons aspirasi publik masih sangat terbatas.

Salah satu indikator utama dari ketimpangan ini adalah ketidakterbukaan dalam menerima umpan balik dari masyarakat. Beberapa informan dari kalangan masyarakat sipil, seperti informan MR dari lembaga pemantau kebijakan daerah, menyebutkan bahwa aduan atau kritik yang mereka sampaikan melalui saluran resmi sering kali tidak ditanggapi, atau bahkan tidak mendapatkan konfirmasi penerimaan. “Kami pernah kirim surat terbuka dan masukan lewat e-mail humas, tapi tidak pernah ada tanggapan balik. Seperti dilempar ke ruang kosong,” jelas MR. Fenomena ini memperlihatkan bahwa alih-alih menjadi jembatan antara aspirasi publik dan pengambil kebijakan, Biro Humas justru memosisikan dirinya sebagai corong pemerintah tanpa mekanisme reflektif ke dalam.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya forum dialog atau kanal digital partisipatif yang difasilitasi oleh Biro Humas. Di era digital, berbagai pemerintah daerah mulai mengembangkan platform interaktif seperti e-consultation, live town hall, hingga media sosial berbasis respons cepat. Namun, dari hasil observasi terhadap kanal media sosial resmi Pemerintah Provinsi Maluku, mayoritas kontennya masih berupa informasi satu arah seperti jadwal kegiatan, ucapan seremonial, atau berita seputar pimpinan daerah. Fitur komentar tidak selalu aktif, dan ketika aktif pun, tidak terlihat adanya respons aktif dari admin atau petugas yang berwenang. Hal ini menunjukkan rendahnya kesiapan institusi dalam membangun komunikasi berbasis dialog.

Situasi ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai entitas yang jauh, formal, dan tidak inklusif. Informan AT, seorang tokoh pemuda di Ambon, menggambarkan bahwa banyak warga merasa tidak punya saluran untuk menyampaikan suara mereka secara langsung, apalagi untuk didengar secara serius. “Pemerintah rasanya seperti dunia sendiri, bicara dengan bahasa mereka sendiri. Kita yang di luar, hanya bisa dengar, bukan diajak ngomong,” ungkap AT. Pernyataan ini mencerminkan jurang sosial dan psikologis yang menghalangi terbentuknya relasi komunikasi yang setara antara warga dan pemerintah.

Dalam konteks konseptual, temuan ini menyingkap kegagalan Biro Humas dalam mengaktualisasikan prinsip dasar dari komunikasi publik deliberatif, sebagaimana dikembangkan dalam gagasan *Deliberative Public Communication* oleh Junk et al. (2021). Teori ini menekankan bahwa legitimasi pemerintah dalam masyarakat demokratis tidak cukup dibangun lewat penyampaian informasi atau manipulasi simbolik, tetapi melalui proses komunikasi timbal balik yang melibatkan warga sebagai subjek aktif. Komunikasi yang deliberatif memungkinkan pemerintah mendengarkan kebutuhan masyarakat secara mendalam, menimbang masukan secara rasional, dan menjadikannya bagian dari proses pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, Biro Humas masih memosisikan publik sebagai objek komunikasi, bukan mitra deliberasi. Informasi disusun secara vertikal, seolah sudah final dan tinggal disampaikan. Padahal, dalam realitas sosial-politik kontemporer, masyarakat semakin kritis dan menuntut ruang partisipasi yang nyata. Ketika komunikasi hanya dibangun dari atas, tanpa respons ke bawah dan tanpa ruang lateral di antara warga, maka yang lahir bukan legitimasi, tetapi jarak yang semakin lebar antara pemerintah dan yang diperintah.

Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa kegiatan kehumasan bersifat event-oriented—mengacu pada momen seremonial seperti Hari Jadi Provinsi atau kunjungan pejabat pusat—tanpa tindak lanjut dalam bentuk forum warga atau diskusi publik. Bahkan ketika terjadi krisis, seperti misalnya kebijakan kenaikan retribusi daerah yang menimbulkan keresahan, tidak terlihat adanya upaya membangun dialog terbuka yang melibatkan masyarakat. Dalam kerangka ini, kegagalan membangun komunikasi dua arah menjadi titik kritis yang harus segera dibenahi. Sebab, tanpa kehadiran publik sebagai subjek komunikasi, fungsi kehumasan tidak akan pernah menjadi jembatan legitimasi yang kokoh—melainkan hanya panggung simbolik yang rapuh.

Kapasitas Aktor Humas dalam Merespons Dinamika Sosial-Politik

Dalam lanskap demokrasi lokal yang semakin kompleks dan dinamis, aktor-aktor kehumasan semestinya tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan dari institusi kepada publik, tetapi juga sebagai pengamat, analis, dan penerjemah kondisi sosial-politik di akar rumput. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kapasitas aktor di Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku masih jauh dari peran ideal tersebut. Mereka belum memiliki kompetensi strategis dalam membaca situasi sosial-politik lokal secara komprehensif, apalagi mengartikulusikannya dalam bentuk strategi komunikasi yang adaptif.

Beberapa informan dari internal biro sendiri menyatakan bahwa pengambilan keputusan komunikasi sepenuhnya bergantung pada instruksi pimpinan, dan tidak ada mekanisme atau kultur kerja yang mendorong inisiatif dari staf bawah untuk menyampaikan analisis atau rekomendasi. Salah seorang staf, yang kami beri inisial NS, menyampaikan bahwa mereka biasanya hanya “meneruskan informasi atau menyiapkan acara sesuai perintah,” tanpa ada keharusan untuk memahami secara mendalam konteks sosial di balik kebijakan yang dikomunikasikan. Ketika ditanya apakah pernah ada forum refleksi bersama antara Humas dan unit kebijakan, NS menjawab bahwa kegiatan semacam itu “belum pernah terjadi secara rutin.”

Fakta ini diperkuat oleh pengamatan lapangan yang menunjukkan bahwa reaksi kehumasan terhadap isu-isu publik cenderung lambat dan reaktif. Misalnya, ketika muncul gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir, tidak ada pernyataan resmi dari Biro Humas yang mampu menjawab keresahan publik secara substansial. Bahkan, konten media sosial pemerintah tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak ada dinamika sosial yang sedang terjadi. Ini mencerminkan ketiadaan mekanisme sensing—kemampuan merespons dan menavigasi opini publik secara real time dan sensitif.

Secara konseptual, temuan ini mengarah pada satu kesimpulan: Biro Humas tidak menjalankan fungsi sebagai aktor intelijen sosial, melainkan sebatas operator administratif. Padahal, dalam konteks demokrasi lokal, fungsi “intelijen sosial” menjadi krusial agar pemerintah tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, membaca, dan mengantisipasi arah angin opini masyarakat. Ketika humas kehilangan peran ini, pemerintah daerah kehilangan alat strategis untuk menjaga kepekaan politiknya terhadap realitas masyarakat yang terus bergerak.

Fenomena ini sejalan dengan pemikiran Akter (2020) yang memperkenalkan konsep Strategic Political Sensing. Menurut mereka, institusi pemerintahan yang efektif adalah yang mampu mengembangkan kepekaan politik sebagai bagian dari kerja strategis komunikasi. Political sensing bukan sekadar mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami mengapa dan bagaimana sebuah isu berkembang di ruang publik, serta bagaimana meresponsnya dengan cerdas dan kontekstual. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi instrumen antisipatif, bukan hanya instrumen klarifikasi pasca-kebijakan.

Namun, di Maluku, fungsi ini nyaris tidak terlihat. Ketika pimpinan daerah menghadapi tekanan publik, Biro Humas seringkali memilih jalan diam atau justru menyampaikan pernyataan normatif yang tidak menjawab substansi. Salah satu informan dari media lokal, berinisial YL, menyatakan bahwa “siaran pers dari pemerintah kadang datang terlambat dan terlalu kaku, tidak menjawab persoalan yang dimaksud oleh masyarakat.” Hal ini menambah kesan bahwa pemerintah hadir sebagai figur yang tidak cukup tanggap, bahkan terhadap krisis yang menyentuh legitimasi kebijakannya sendiri. Di titik inilah urgensi penguatan kapasitas muncul. Bukan hanya dalam hal keterampilan teknis komunikasi, tetapi terutama dalam kemampuan strategis membaca masyarakat. Pemerintah daerah, melalui Biro Humas, perlu memperluas peran sebagai pembaca situasi sosial, penafsir kecenderungan opini publik, dan perumus narasi kebijakan yang tidak hanya persuasif, tetapi juga reflektif terhadap konteks sosial tempat kebijakan itu diterapkan.

Legitimasi yang Rentan: Citra tanpa Substansi

Dalam lanskap demokrasi lokal yang ditandai oleh fluktuasi sosial dan tuntutan publik yang semakin kompleks, legitimasi politik bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh sekali dan untuk selamanya. Ia harus terus-menerus dipelihara melalui dialog, responsivitas, dan kepekaan terhadap realitas sosial. Namun, di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, penelitian ini menemukan bahwa proses tersebut kerap digantikan oleh praktik pencitraan yang dangkal dan retorik—sebuah konstruksi visual dan simbolik yang tidak berpijak kuat pada substansi sosial.

Salah satu narasi dominan yang dikomunikasikan oleh Biro Humas adalah tentang “Maluku sebagai pusat pertumbuhan kawasan timur Indonesia.” Narasi ini hadir dalam berbagai kanal resmi—baik dalam bentuk siaran pers, spanduk dengan jargon pembangunan, maupun unggahan media sosial yang menggambarkan Gubernur dalam berbagai aktivitas seremonial. Namun, observasi lapangan di sejumlah titik di Kota Ambon justru menunjukkan

adanya jurang antara pesan-pesan optimistik tersebut dengan kondisi infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, perumahan, dan layanan publik lainnya yang masih bermasalah. Diskoneksi semacam ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan, tetapi juga memicu sinisme warga terhadap narasi pemerintah.

Beberapa informan warga, seperti ER (aktivis komunitas), menyampaikan bahwa “apa yang dikatakan pemerintah lewat media seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami alami. Mereka sibuk berbicara tentang investasi, tapi air saja susah.” Pernyataan ini bukan sekadar keluhan teknis, melainkan cermin dari rasa keterasingan publik terhadap narasi pembangunan yang terasa jauh dan tidak relevan. Kesan ini diperparah oleh minimnya forum klarifikasi atau respons publik ketika kritik mulai menguat, misalnya saat krisis harga pangan dan inflasi lokal beberapa waktu lalu. Tidak ada konferensi pers terbuka, tidak ada kanal dialog digital yang aktif, bahkan media sosial Humas tetap memuat konten-konten visual normatif tanpa ruang refleksi kritis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan yang tajam antara pencitraan dan kenyataan. Biro Humas tampak lebih sibuk membangun narasi positif daripada membangun saluran komunikasi yang jujur dan responsif. Ketika publik mengalami situasi krisis, narasi positif tersebut justru terasa hampa—karena tidak menjawab rasa cemas dan kebutuhan informasi mereka. Citra yang dibangun secara satu arah menjadi mudah runtuh begitu diuji oleh realitas sosial yang tidak sesuai.

Secara teoretis, kegagalan ini mencerminkan tidak hadirnya apa yang oleh Gulluscio (2023) disebut sebagai *legitimacy through engagement*. Dalam kerangka ini, legitimasi tidak dibentuk semata-mata dari persepsi yang dibentuk dari atas ke bawah melalui media, tetapi dibangun dari proses keterlibatan bermakna antara pemerintah dan masyarakat. Engagement bukan hanya soal komunikasi, tetapi soal kehadiran yang nyata—yakni saat pemerintah mendengar, merespons, dan menyesuaikan arah kebijakan berdasarkan kebutuhan dan suara warga.

Sayangnya, Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku belum menjalankan fungsi ini secara optimal. Tidak ditemukan sistem monitoring sentimen publik yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan komunikasi. Salah satu staf biro, yang disingkat dengan inisial TD, mengakui bahwa “kami belum punya sistem untuk mengecek reaksi masyarakat secara langsung, biasanya hanya dari media atau arahan pimpinan.” Ketergantungan pada struktur komando dan ketiadaan mekanisme engagement membuat legitimasi pemerintah menjadi rapuh secara struktural dan simbolik. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan bahwa pencitraan tanpa fondasi substansi justru berisiko menggerus kepercayaan publik secara lebih dalam. Pemerintah terlihat aktif berbicara, tetapi publik merasa tidak didengarkan. Ketika krisis muncul—baik dalam bentuk bencana alam, konflik sosial, maupun kebijakan yang tidak populer—maka kepercayaan yang dibangun melalui citra tidak cukup kuat untuk menopang stabilitas sosial-politik. Legitimasi yang dibangun secara simbolik tanpa fondasi partisipatif hanya akan menjadi bangunan retorik yang mudah retak ketika diuji oleh realitas.

Menuju Profesionalisasi dan Transformasi Peran Humas

Temuan-temuan yang telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan sebuah pola

konsisten: bahwa Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai mediator strategis antara negara dan warga. Peran Humas, yang seharusnya menjadi jembatan penghubung antara aspirasi publik dan arah kebijakan negara, justru terperangkap dalam rutinitas administratif, perayaan simbolik, dan pencitraan sepihak yang kurang reflektif terhadap realitas sosial. Ketika publik memandang pemerintah sebagai entitas yang jauh, formal, dan tidak inklusif, maka urgensi untuk melakukan transformasi kelembagaan tidak bisa lagi ditunda.

Sejumlah informan internal menyampaikan bahwa komunikasi publik selama ini “hanya sebatas menyampaikan pesan dari pimpinan,” tanpa ada ruang untuk mengolah umpan balik secara serius. Salah satu pejabat humas, YL, mengungkapkan bahwa pihaknya “tidak punya forum internal untuk menganalisis isu publik secara rutin,” sehingga tanggapan terhadap krisis atau kritik masyarakat pun seringkali bersifat improvisatif dan defensif. Observasi lapangan juga memperlihatkan bahwa tidak ada dokumentasi sistematis atas feedback publik atau upaya mengintegrasikannya ke dalam proses perumusan kebijakan.

Situasi ini memperjelas satu hal: komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku belum diposisikan sebagai fungsi strategis, melainkan sebagai pelengkap prosedural belaka. Padahal, dalam dinamika sosial-politik kontemporer yang semakin kompleks dan terbuka, legitimasi tidak hanya dibangun lewat kehadiran negara, tetapi juga melalui kemampuan negara untuk mendengar dan berdialog secara aktif dengan warganya. Seperti ditegaskan oleh Castells (2014) dalam *Communication Power*, dalam era masyarakat jaringan, kekuasaan politik tidak lagi monopoli institusi, tetapi harus dinegosiasikan melalui ruang komunikasi yang dinamis.

Berangkat dari realitas tersebut, transformasi peran Humas menjadi sangat penting. Transformasi ini mencakup beberapa dimensi. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan dalam analisis sosial-politik, keterampilan komunikasi krisis, serta penggunaan teknologi komunikasi digital yang partisipatif. Kedua, pembenahan struktur kelembagaan, agar fungsi komunikasi tidak lagi berada di posisi perifer, tetapi terintegrasi secara erat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Ketiga, pengarusutamaan komunikasi publik sebagai strategi demokratisasi, di mana informasi tidak hanya disebar, tetapi menjadi bahan diskusi bersama warga dalam kerangka deliberatif.

Seorang staf biro yang lain, AK, menyatakan bahwa mereka “butuh pelatihan yang tidak hanya teknis, tapi juga teoritis, agar bisa paham konteks sosial secara lebih luas.” Ini mencerminkan kesadaran di internal biro bahwa praktik kehumasan tidak bisa lagi sekadar mengandalkan keahlian teknis produksi konten, tetapi harus bersentuhan dengan ilmu sosial-politik yang mampu membaca dinamika masyarakat secara adaptif. Pendekatan baru ini juga merefleksikan kebaruan artikel ini secara tersirat. Jika dalam banyak studi kehumasan pemerintahan di Indonesia, komunikasi dipahami hanya sebagai upaya penyampaian informasi atau penguatan legitimasi, maka penelitian ini justru menggarisbawahi bahwa komunikasi adalah arena negosiasi makna dan relasi kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, Biro Humas tidak hanya menyampaikan pesan dari pemerintah, tetapi juga menyerap,

menafsirkan, dan mengartikulasikan aspirasi warga dalam bahasa kebijakan. Sebagaimana gagasan Frederiksen & Himley (2020) bahwa komunikasi politik harus dipahami dalam jaringan relasi horizontal dan vertikal, yang saling mempengaruhi dan dinamis. Dalam konteks lokal, ini berarti biro humas dituntut untuk menjadi aktor reflektif, bukan hanya representatif. Artinya, mereka perlu memahami konteks sosiokultural masyarakat Maluku secara mendalam—bukan sekadar menyuarkan agenda pembangunan dari pusat kekuasaan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Biro Humas Pemerintah Provinsi Maluku belum mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mereproduksi citra dan membangun legitimasi politik pemerintah daerah di tengah dinamika sosial-politik yang terus berubah. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh komunikasi yang bersifat satu arah, minimnya kemampuan analitis terhadap realitas sosial, serta lemahnya integrasi antara narasi kebijakan dan persepsi publik. Biro Humas cenderung mereproduksi citra melalui simbolisme administratif yang tidak membumi, alih-alih menciptakan komunikasi yang reflektif, dialogis, dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat. Ketergantungan terhadap arahan pimpinan tanpa adanya inisiatif kelembagaan menunjukkan lemahnya posisi Humas sebagai aktor strategis dalam manajemen komunikasi politik. Penelitian ini, dengan pendekatan integratif antara teori komunikasi politik dan dinamika kelembagaan lokal, menampilkan kebaruan dalam melihat relasi negara dan masyarakat melalui kinerja komunikasi birokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi strategis di tingkat pemerintah daerah harus dibangun bukan semata sebagai alat penyebaran informasi, tetapi sebagai proses negosiasi makna yang menuntut kapasitas kelembagaan yang profesional, adaptif, dan partisipatif dalam mengelola legitimasi di ruang publik lokal.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter, M. (2020). Women's Political Participation in Bangladesh Parliament : a Case Study Analysis of Women's Substantive Representation. In *Politische Teilhabe von Frauen im bangladeschischen Parlament : eine Fallstudien analyse zur inhaltlichen Vertretung von Frauen* (p. 53). Universität Bremen.
- Alamin, T., Wisadirana, D., Kanto, S., Mochtar, H., Mu'adi, S., & Mardiyono, M. (2020). Political Change Patterns of The Mataraman Society in Kediri. *Journal of Development Research*, 4(2), 106–114. <https://doi.org/10.28926/jdr.v4i2.121>
- Ali, A. (2020). *An investigation into the role of local government in enhancing the public participation in Sindh, Pakistan: policy and practice in service delivery*. University of Bradford.
- Azwar, W., & Muliono, M. (2022). The Multifaced Politics: A Study on Polarization of Political Behavior of Tarekat Community in West Sumatera, Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 315–346. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.315-346>
- Baharuddin, T., Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Syamsurrijal, M. (2022). Bibliometric analysis of socio-political research on capital relocation: Examining contributions to the case of Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 5(1), 17–31. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19468>
- Bashri, Y. (2021). Kiai in Indonesian Social-Political Changes. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 2(1), 67–88. <https://doi.org/10.35672/jnus.v2i1.67-88>
- Braun, V., & Clarke, V. (2016). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Burchanuddin, A., Agustang, A., Adam, A., & Alim, A. (2021). Cultural Reproduction in the Socio-political Context of Bone District, South Sulawesi, Indonesia. *Journal Of Sociology And Social Anthropology*, 12(1–2), 12–22. <https://doi.org/10.31901/24566764.2021/12.1-2.361>
- Castells, M. (2014). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Dewasiri, N., Banda, Y. K. W., & Azeez, A. A. (2018). Triangulation approaches in finance research. *Colombo Journal of Multi-Disciplinary Research*, 3(2). <https://doi.org/10.4038/cjmr.v3i2.33>
- Durmuş, E. (2020). A typology of local governments' engagement with human rights: Legal pluralist contributions to international law and human rights. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 38(1), 30–54. <https://doi.org/10.1177/0924051920903241>
- Fatah, R. A., Arifin, S., Sudarwo, V. S. D., & Lendriyono, F. (2023). Local Values in Local Political Culture and Democracy: A Review of Hermeneutics among Local Elites. *Technium Soc. Sci. J.*, 46, 298. <https://doi.org/10.47577/tssj.v46i1.9302>
- Feber, W., & Christover, D. (2021). Indonesia's socio-political developments during Jokowi's leadership: A study of political journals from an international perspective. *Linguistics and Culture Review*, 1588–1598. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS1.1966>
- Filippi, M. E. (2022). A role for municipal governments in leveraging transformative change for urban disaster risk management: The experience of Santa Fe, Argentina, with urban flood risk. *Climate Risk Management*, 35, 100397. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2022.100397>

- Frederiksen, T., & Himley, M. (2020). Tactics of dispossession: Access, power, and subjectivity at the extractive frontier. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 45(1), 50–64. <https://doi.org/10.1111/tran.12329>
- Garriott, P. O. (2020). A critical cultural wealth model of first-generation and economically marginalized college students' academic and career development. *Journal of Career Development*, 47(1), 80–95. <https://doi.org/10.1177/0894845319826266>
- Grin, J. (2020). 'Doing' system innovations from within the heart of the regime. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(5), 682–694. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1776099>
- Gulluscio, C. (2023). Legitimacy Theory. In *Encyclopedia of Sustainable Management* (pp. 2209–2215). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25984-5_175
- Hartono, B. W. (2020). *A study of decentralized local government in promoting good governance: The case of Sleman Regency, Special Province of Yogyakarta, Indonesia*. UNSW Sydney.
- Hatala, R. (2023). Transformasi Digital di Pedesaan: Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 104–125.
- Ilyas, I. M. (2023). Transformasi Pengembangan Kapasitas Guru: Dari Cascade Model ke Pelatihan Berbasis Sekolah di Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 126–146.
- Jentoft, N., & Olsen, T. S. (2019). Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a 'slow' interview technique enriches data. *Qualitative Social Work*, 18(2), 179–193. <https://doi.org/10.1177/1473325017712581>
- Junk, W. M., Romeijn, J., & Rasmussen, A. (2021). Is this a men's world? On the need to study descriptive representation of women in lobbying and policy advocacy. *Journal of European Public Policy*, 28(6), 943–957. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1767179>
- Leydesdorff, L. (2021). Evolutionary and institutional triple helix models. *The Evolutionary Dynamics of Discursive Knowledge: Communication-Theoretical Perspectives on an Empirical Philosophy of Science*, 15(2), 89–113. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59951-5_5
- Macq, H., & Jacquet, V. (2023). Institutionalising participatory and deliberative procedures: The origins of the first permanent citizens' assembly. *European Journal of Political Research*, 62(1), 156–173. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12499>
- Nulhasanah, L. (2023). *Dinamika sosial Politik Kaum Pribumi Dalam Regentschapraad Garut 1925-1942*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Permana, Y. S., Satriani, S., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., Seftiani, S., & Suryani, D. (2023). Post-politicizing the environment: local government performance assessments in Indonesia. In *Environmental Governance in Indonesia* (pp. 51–65). Springer International Publishing Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15904-6_4
- Prasetyo, N., Fadli, M., Tunggul, S. N., & Safaat, M. (2021). The Politics of Indonesia's Decentralization Law Based on Regional Competency. *Brawijaya Law Journal*, 8(2), 159–184. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.02.01>
- Qin, X., & Owen, C. (2021). Social forces and street-level governance in Shanghai: From compliance to participation in recycling regulations. *The China Quarterly*, 248(1), 1081–

1102. <https://doi.org/10.1017/S0305741021000114>
- Röell, C., Osabutey, E., Rodgers, P., Arndt, F., Khan, Z., & Tarba, S. (2022). Managing socio-political risk at the subnational level: Lessons from MNE subsidiaries in Indonesia. *Journal of World Business*, 57(3), 101312. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101312>
- Sari, N. H. (2022). *Communication approaches for participatory planning and civic engagement in sustainable governance systems: a study of social communicative behaviour in Indonesia*.
- Sekarintias, A., Verrier, B., & Cronin, J. (2023). Untangling the socio-political knots: A systems view on Indonesia's inclusive energy transitions. *Energy Research & Social Science*, 95, 102911. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102911>
- Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised governance in Indonesia's disadvantaged regions: A Critique of the underperforming model of local governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 359–380. <https://doi.org/10.1177/1868103420963140>
- Taufiq, M., & Hidayat, R. (2022). The constraining dynamics to promote the inclusive village governance in an autocratic leadership setting. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1), 55–69. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.442>
- Udiyasa, K. (2023). Kolaborasi Triple Helix dalam Program Inovasi Desa: Mendorong Ekonomi Berbasis Pengetahuan di Desa Poka, Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 32–49. <https://doi.org/10.30598/populisvol18iss1pp32-49>
- Wang, D., & Guo, S. Z. (2023). Native advertising in the Chinese press: implications of state subsidies for journalist professional self-identification. In *Sponsored Editorial Content in Digital Journalism* (pp. 110–126). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003376576-6>
- Wargent, M., Parker, G., & Street, E. (2020). Public-private entanglements: consultant use by local planning authorities in England. *European Planning Studies*, 28(1), 192–210. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1677565>
- Westphal, J. D. (2023). Systemic symbolic management, corporate social responsibility, and corporate purpose: A cautionary tale. *Strategy Science*, 8(2), 221–232. <https://doi.org/10.1287/stsc.2023.0188>
- Widodo, J., & Kusnan, K. (2023). Mapping and Analyzing E-Government Sentiments in Local Governments in Indonesia. *Society*, 11(2), 434–457. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558>
- Wojakowski, D. (2022). Borderland Organizations: Creating the Idea of a Borderland in Eastern Poland. *Polish Sociological Review*, 217(1), 23–44. <https://doi.org/10.26412/psr217.02>
- Yang, Z. (2021). Destructive reconstruction in China: interpreting authenticity in the Shuidong reconstruction Project, Huizhou, Guangdong Province. *Built Heritage*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s43238-021-00033-x>
- Yuana, S. L., Sengers, F., Boon, W., Hajer, M. A., & Raven, R. (2020). A dramaturgy of critical moments in transition: Understanding the dynamics of conflict in socio-political change. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 37, 156–170. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.08.009>
- Zhang, F., Chung, C. K. L., Lu, T., & Wu, F. (2021). The role of the local government in China's urban sustainability transition: A case study of Wuxi's solar development. *Cities*, 117, 103294. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103294>